

**KONTRIBUSI PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2012-2016**

Oleh :
Muhammad Taufik Maulana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email : muhammadtaufikmaulana188@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the contribution of Economic Growth, District Own Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Specific Allocation Funds (DAK) for Regency / City Government Capital Expenditures in South Sulawesi year 2012-2016 both partially and simultaneously. This research's method used descriptive method. The population in this study is the Regency / City in South Sulawesi which consists of 21 Regencies and 3 Cities year 2006-2015. This study used secondary data. In order to test the hypothesis, in this study using multiple linear regression with t test, F test, and the coefficient of determination. The data that has been collected is analyzed in advance by testing the classical assumptions then the hypothesis test with the SPSS 21.0 test tool. Based on the results of the study, it can be concluded that partially the Economic Growth and Specific Allocation Funds variables have no effect on Capital Expenditure, while the PAD and DAU have a positive effect on capital expenditure. Simultaneously, the variables of Economic Growth, PAD, DAU, and DAK have a significant effect on Capital Expenditure.

Keywords: *Economic Growth, District Own Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Specific Allocation Fund (DAK) and Capital Expenditures*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan dan harus dipertanggungjawabkan masyarakat baik secara langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisien, dan efektif berdasarkan tujuan dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perumusan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam hal ini disebut APBD harus merujuk pada tujuan dan sasaran yang pasti sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi dari publik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi merupakan proses perubahan secara terus menerus di dalam suatu negara dalam menyediakan produk-produk ekonomi kepada masyarakat dalam waktu dan periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu faktor yang dapat memicu tingkat pertumbuhan ekonomi. PDRB merupakan kenaikan nilai tambah barang dan jasa sebagai akibat aktivitas ekonomi dalam

suatu wilayah atau daerah. Kenaikan PDRB dapat dipengaruhi oleh adanya pembangunan infrastruktur yang memadai.

Pembangunan infrastruktur dan pos-pos layanan publik dipengaruhi oleh seberapa besar kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dengan meningkatnya PAD, diharapkan mampu meningkatkan alokasi belanja modal pemerintahan daerah dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik, akan tetapi realita yang ada peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan meningkatnya pula anggaran belanja modal yang signifikan. Salah satu penyebabnya karena pendapatan asli daerah dialokasikan untuk membiayai belanja lainnya seperti belanja pegawai yang dinilai dalam APBD. Hal ini berdampak pada berkurangnya alokasi untuk belanja modal yang dinilai lebih memiliki pengaruh signifikan terhadap pemenuhan pelayanan publik yang memadai kepada masyarakat.

Selain PAD, dana perimbangan adalah salah satu penerimaan daerah yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan

“Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. DAU merupakan respon pemerintah pusat terhadap aspirasi pemerintah daerah untuk andil dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan maksud tertentu seperti adanya pembangunan khusus, pengembangan sektor tertentu bahkan pembangunan yang menjadi skala prioritas nasional. Dengan memaksimalkan penerimaan daerah, pemerintah daerah juga memiliki dampak baik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Realita yang ada bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal sangat kecil sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) terjadi peningkatan yang sangat besar. Hal ini berdampak pada berkurangnya peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap kegiatan daerah yang semestinya PAD menjadi sumber pokok dalam membiayai kegiatan daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi selatan adalah salah satu daerah yang terkena dampak dari kebijakan otonomi daerah. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pintu gerbang kawasan Indonesia Timur. Selain daripada itu Sulawesi Selatan juga memiliki potensi Sumber Daya Alam

(SDA) yang cukup besar terutama pada bidang pertanian, pertambangan, dan pariwisata. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan modal potensi daerah yang memadai.

Dari penelitian-penelitian terdahulu, Sudrajat dan Purniawati (2018) dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal. DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian Adyatma dan Oktaviani (2015) dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Arah koefisien regresi bertanda positif, berarti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan dana alokasi umum dengan Belanja Modal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana

Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal (Studi kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2016).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memiliki kontribusi terhadap belanja modal?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kontribusi terhadap belanja modal?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki kontribusi terhadap belanja modal?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki kontribusi terhadap belanja modal?
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki kontribusi terhadap belanja modal?

II. METODE PENELITIAN

A. Obyek/Subyek Penelitian

Obyek yang digunakan adalah Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan Subyek dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2012-2016.

B. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari data yang sudah ada yang berasal dari berbagai sumber. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran dan Badan Pusat Statistik.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen. Menurut Sugiyono (2008), Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya monumental dari seseorang. Misalnya peraturan, kebijakan, biografi, catatan harian dll.

D. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang di pengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal (Y). Belanja Modal merupakan perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari 1 periode akuntansi atau 1 tahun. Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya. Indikator variabel ini dapat diukur dengan :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin +
Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan,
Irigasi, dan Jaringan + Belanja fisik lainnya

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Dana Alokai Umum (X3), dan Dana Alokasi Khusus (X4).

a. Pertumbuhan Ekonomi (X1)

Pertumbuhan ekonomi yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru (Boediono 2010). Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan pertumbuhan perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(PDRBt - PDRBt-1)}{PDRBt-1} \times 100\%$$

b. Pendapatan Asli Daerah (X2)

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diukur menggunakan rumus :

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-Lain PAD yang sah}$$

c. Dana Alokasi Umum (X3)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pengertian dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar, Dimana}$$

$$\text{Celah fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

d. Dana Alokasi Khusus (X4)

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan khusus dan menjadi skala prioritas nasional. DAK dapat dilihat dari pos dana perimbangan pada laporan realisasi APBD.

E. Uji Kualitas Data

1. Uji Normalitas

Menurut Darma & Basuki (2015) uji normalitas berguna untuk memastikan bahwa residual dalam model regresi memiliki distribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Darma & Basuki (2015) Multikolinieritas adalah adanya hubungan linear antara sesama variabel independen.

3. Uji Autokorelasi

Menurut Darma & Basuki (2015) uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Darma & Basuki (2015) uji heteroskedastisitas adalah pengujian adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.

F. Uji Hipotesis dan Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik suatu variabel yang akan diteliti di dalam suatu situasi/kondisi. Adapun analisis statistik deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif bagi orang yang membacanya.

2. Uji Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui suatu hubungan antar variabel independen (lebih dari satu variabel) dengan variabel dependen apakah memiliki hubungan yang positif atau negatif. Persamaan regresi berganda di dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

β = koefisien regresi

X1 = Pertumbuhan Ekonomi

X2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X3 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X4 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

e = error

3. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan).

4. Uji t

Uji t (pengaruh secara parsial). Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen. Jika nilai adjusted R^2 makin mendekati 1 maka makin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.

III. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian

Obyek yang digunakan adalah Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan Subyek dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2012-2016. Jenis data yang digunakan adalah berupa data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu data

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Belanja Modal yang diakses melalui situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah melalui internet dan Biro Pusat Statistik (BPS).

B. Statistik Deskriptif

Tabel 1
Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	120	23.11	27.38	25.8776	.76515
Pertumbuhan Ekonomi	120	.48	2.41	2.0175	.20912
Pendapatan Asli Daerah	120	24.58	27.91	26.9200	.53372
Dana Alokasi Umum	120	22.15	26.76	25.1899	.74366
Dana Alokasi Khusus	120	18.83	27.90	24.8815	.97594
Valid N (listwise)	120				

Dari tabel 1 hasil uji statistik deskriptif diatas dapat dilihat bahwa seluruh variable penelitian ini menggunakan 120 sampel. Pada variable belanja modal memiliki nilai minimum sebesar 23,11 dan maksimum 27,38. Dengan rata-rata 25,87 dan nilai standard deviasi 0,76. Pada variabel selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi dengan nilai minimum sebesar 0,48 dan nilai maksimum 2,41. Dengan rata-rata 2,01 dan nilai standard deviasinya 0,20. Pada variable pendapatan asli daerah menunjukkan nilai minimum 24,58 dan nilai maksimum sebesar 27,91. Dengan rata-rata 26,92 serta nilai standard deviasi sebesar 0,53. Pada

variable dana alokasi umum memiliki nilai minimum sebesar 22,15 dan nilai maksimumnya sebesar 26,76. Dengan rata-rata sebesar 25,18 dan nilai standard deviasinya sebesar 0,74. Variabel yang terakhir adalah dana alokasi khusus terdapat nilai minimum sebesar 18,83 dan nilai maksimum sebesar 27,90. Dengan nilai rata-rata menunjukkan 24,88 dengan standar deviasi sebesar 0,97.

C. Uji Kualitas Data

Tabel 2
Uji Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas	Multikolinearitas		Heteroskedastisitas	Auto korelasi (Durbin Watsen)
		Tolerance	VIF		
	0,065				1.781
Pertumbuhan Ekonomi (X1)		.979	1.021	.368	
PAD (X2)		.891	1.122	.116	
DAU (X3)		.902	1.109	.070	
DAK (X4)		.966	1.035	.140	
Syarat Lolos Uji	>0,05	>0,1	<10	>0,05	-2<DW>2

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan nilai uji normalitas sebesar $0,065 > 0,05$, hal ini menyimpulkan bahwa data diatas terdistribusi normal. Sedangkan untuk uji multikolinearitas, dari semua variabel menunjukkan nilai $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data diatas terbebas dari multikolinearitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai $> 0,05$, artinya semua data diatas dapat disimpulkan terbebas dari heteroskedastisitas.

Selain daripada itu, hasil pengujian autokorelasi (Durbin Watson) menunjukkan nilai sebesar 1,781 lebih besar dari -2 dan lebih kecil dari 2 sehingga dapat disimpulkan bahwa data diatas terbebas dari autokorelasi.

D. Uji Hipotesis dan Analisis Data

Tabel 3
Analisis Regresi Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficient		Sig.
	B	Standard error	
Constant	6.586	3.450	.059
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	-.364	.290	.212
PAD (X2)	.319	.119	.008
DAU (X3)	.425	.085	.000
DAK (X4)	.030	.062	.637
Adjusted R²			.270
Sig. F			.000

Dari tabel 3 diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,270, artinya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 27 %. Selain itu, nilai sig dalam pengujian F sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen secara bersama-sama (simultan) berkontribusi terhadap belanja modal. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis (H₅) yang menyebutkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berkontribusi terhadap belanja modal diterima. Hasil uji t pada tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Hipotesis 1 : Pertumbuhan Ekonomi berkontribusi terhadap Belanja Modal

Pada tabel 3 diatas menunjukkan nilai sig variabel pertumbuhan ekonomi sebesar $0,212 > \alpha (0,05)$ artinya variabel pertumbuhan ekonomi tidak berkontribusi terhadap variabel dependen belanja modal. Hal ini disebabkan karna pertumbuhan ekonomi hanya menjelaskan keadaan ekonomi suatu daerah dan tidak memberikan dana langsung kepada daerah. Selain daripada itu maka dapat dikatakan bahwa hipotesis 1 tidak diterima.

2. Hipotesis 2 : Pendapatan Asli Daerah berkontribusi terhadap Belanja Modal

Pada tabel 3 diatas menunjukkkn nilai sig variabel pendapatan asli daerah sebesar $0,008 < \alpha 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berkontribusi terhadap belanja modal. dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 2 diterima

3. Hipotesis 3 : Dana Alokasi Umum berkontribusi terhadap Belanja Modal

Pada tabel 3 diatas menunjukkan nilai sig variabel dana alokasi umum sebesar $0,000 < \alpha 0.05$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dana alokasi umum berkontribusi terhadap belanja modal. dengan demikian, hipotesis 3 diterima

4. Hipotesis 4 : Dana Alokasi Khusus berkontribusi terhadap Belanja Modal

Pada tabel 3 diatas menunjukkan nilai sig variabel dana alokasi khusus sebesar $0,637 > \alpha 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dana alokasi khusus tidak berkontribusi terhadap belanja modal. hal ini disebabkan karna belanja modal merupakan belanja fisik daerah yang memiliki umur ekonomi lebih dari 12 bulan atau 1 tahun sedangkan dana alokasi khusus dapat digunakan untuk belanja yang bersifat non fisik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 tidak diterima.

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$BM = 6.586 - 0.364PE + 0.319 PAD + 0.425 DAU + 0.030 DAK + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa setiap penurunan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan belanja modal sebesar 0,364. Setiap kenaikan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan 0,319 belanja modal. setiap kenaikan dana alokasi umum dapat meningkatkan belanja modal sebesar 0,425. Setiap

kenaikan dana alokasi khusus dapat meningkatkan belanja modal sebesar 0,030.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2016.

1. Berdasarkan pengujian data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut
Pertumbuhan Ekonomi tidak berkontribusi terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2016
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2016
3. Dana Alokasi Umum (DAU) berkontribusi positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2016
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berkontribusi terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2016

5. Secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berkontribusi positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2016

B. SARAN

1. Melihat kontribusi PAD dan DAU terhadap Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2012-2016 memiliki kontribusi positif sehingga peneliti menyarankan agar pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan untuk meningkatkan alokasi PAD dan DAU ke anggaran belanja modal.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi penerimaan terbesar pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sehingga peneliti menyarankan agar pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dapat memaksimalkan potensi daerah dalam meningkatkan PAD daerahnya sehingga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu melakukan pengembangan penelitian dengan memilih variable yang lebih bervariasi serta menggunakan pengukuran yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E. & Oktaviani, R. M. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi". *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, Vol 4 (2).
- Boediono. 2010. *Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?*, Kumpulan Esai ekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Darma, E. S. & Basuki, A. T. 2015. *Statistika Aplikasi pada Ekonomi, Bisnis dan Penelitian*. Sleman Yogyakarta: Danisa Media.
- Indonesia, M. K. (2015). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015*. Jakarta: Menteri Kesehatan Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum.
- Republik Indonesia. 2004. Daerah. U. U. O. 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Lembaran Negara Pemerintah Republik Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sudrajat, M. A. & Purniawati, I. D. 2018. "Analisis Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2015". *Inventory: Jurnal Akuntansi*. Vol 1 (1).
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.